

# Strategi Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan menuju Generasi Maju Indonesia

Wiwin Rif'atul Fauziyati<sup>1</sup>

## Abstract

*Principal as a leader of educational institutions have a great role in information of advantage generation of smart, independent, and able to adapt in the life of global society. However, to achieve these things requires the participation of community in the implementation of educational programs at school. Community involment in the management of education is an effort to community empowerment in the development of educational which means engaging community in a planning, implementation and supervision of education. A various of principal strategies to increase community participation are absolutely necessary. Among them through an effective communication relationship between school and community, community involment and parents in school program, and empowerment of school comittees. Through various strategies are expected community participation will be higher so that it will be able to realize the advanced generation of Indonesia.*

**Keyword:** Strategi, kepala sekolah, partisipasi masyarakat, generasi maju.

## I. Pendahuluan

Peran serta masyarakat dalam pendidikan memiliki posisi penting dan strategis. Hal itu diakui secara resmi, baik dalam undang-undang maupun peraturan menteri. Menurut Undang-undang Sistem

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap IAI Sunan Giri Ponorogo

pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi perkembangan sekolah, seperti halnya hubungan sekolah dan masyarakat. Karena sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan lembaga yang terpisah dari masyarakat.<sup>2</sup> Oleh karena itu sekolah tidak dapat berkembang tanpa kerjasama dengan masyarakat di sekitar sekolah. Masyarakat sekitar sekolah merupakan penyangga utama perjalanan pendidikan.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan harus memiliki berbagai macam strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan berbagai macam strategi tersebut diharapkan akan memunculkan kesadaran yaitu berupa partisipasi yang tinggi dari masyarakat.

Sekolah sebagai sebuah lembaga tempat penyemaian ilmu yang terorganisasi secara formal, sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan jatidiri seseorang, mengubah latar belakang seseorang menjadi lebih baik, sekolah yang baik tidak hanya mengubah anak didiknya menjadi pribadi yang berpendidikan akan tetapi juga turut mengubah lingkungan bermasyarakat menjadi yang lebih baik. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak positif dari partisipasi masyarakat terhadap perkembangan anak, baik di bidang akademik, maupun non akademik di sekolah. Hal ini jelas sangat relevan dengan upaya kepala sekolah dan masyarakat yang terus-menerus mendukung dan membantu pembelajaran dan perkembangan peserta didik, yang akan bermuara pada pencapaian mutu pendidikan di sekolah. Berbagai manfaat atau keuntungan partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak menunjukkan bahwa tolok ukur paling akurat atas sesuatu yang didapat peserta didik di sekolah bukanlah berupa pendapatan atau status sosial, namun lebih luas dari itu, yaitu bahwa

---

<sup>2</sup> Supriono Subakir, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Surabaya: Anggota IKAPI, 2001), 188

masyarakat akan menjadi mampu: (1) menciptakan suatu suasana yang nyaman sehingga mendorong lahirnya sebuah pembelajaran, (2) menunjukkan harapan yang tinggi akan sesuatu yang nantinya akan didapatkan oleh anak-anak mereka dan pengharapan yang tinggi akan pekerjaan anak-anak itu pada masa depan mereka, dan (3) terlibat dalam pendidikan anak mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sudah dipastikan akan mendukung pembangunan pendidikan. Khususnya, partisipasi orangtua sangat strategis bagi pengembangan kecerdasan atau kemampuan anak dalam pembentukan kepribadian yang utuh. Hal inilah yang menjadi dasar bagi fondasi pembentukan intelektual, emosional, spiritual dan moral anak.

Sejatinya pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak komponen. Tidak hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Dalam kaitannya dengan pendidikan, masyarakat (orang tua) diharapkan mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya, sebagaimana prinsip yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu: *ing ngarsa sung tulada*, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga menjadi karakter yang mulia. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia mestinya tidak boleh alpa memberikan pendidikan dan pengalaman sejak dini, jika tidak diyakini akan sulit mewujudkan generasi maju yang sesungguhnya. Generasi maju yang dimaksudkan adalah generasi yang tidak saja cerdas, kompeten, memiliki skill kompetitif, tetapi yang lebih penting lagi adalah memiliki karakter dan jiwa kebangsaan.

## II. Strategi Kepala Sekolah

### a. Strategi

Kata strategi berasal dari kata *strategos* (Yunani) atau *strategus*. *Strategos* berarti jendral atau berarti pula perwira Negara (*states officer*).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Eccles J.S.&Harold R.D., *Parent-School Involment During The Early adolescent Years* (Teacher College Record, 1993), 568.

<sup>4</sup> M. Sumantri dan J. Permana, *Strategi Belajar Mengajar* (Depdikbud,:PT. Proyek Pendidikan Guru SD, 1999), 40.

Jendral inilah yang bertanggungjawab merencanakan suatu strategi yaitu mengarahkan pasukan untuk mencapai kemenangan. Sedangkan J. Salusu merumuskan strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia,<sup>6</sup> *strategi* berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Selanjutnya H. Mansyur<sup>7</sup> menjelaskan bahwa strategi dapat diartikan sebagai garis-garis besar haluan bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut Newman and Logan, strategi dasar dari setiap usaha meliputi empat hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi tujuan yang harus dicapai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya
2. Pertimbangan dan pemilihan cara pendekatan utama yang dianggap ampuh untuk mencapai sasaran
3. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak titik awal pelaksanaan sampai titik akhir dimana sasaran tercapai
4. Pertimbangan dan penetapan tolok ukur dan ukuran baku untuk digunakan dalam mengukur taraf keberhasilan usaha.

## b. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.<sup>9</sup> Sehingga kepala sekolah adalah seorang pemimpin yang mempunyai bawahan yang

<sup>5</sup> J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit* (Jakarta: Grasindo, 1986), 101.

<sup>6</sup> Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 859.

<sup>7</sup> H. Mansyur, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1995/1996), 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 2

<sup>9</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 83.

dipilih dengan cara tertentu yang mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan yang dibantu oleh staf.<sup>10</sup>

Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi Antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

### **c. Kompetensi Kepala Sekolah**

Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, kemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah, setiap kepala sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi, diantaranya:

#### **1. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompetensi kepribadian antara lain:

- a. Berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas di sekolah (madrasah)
- b. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemeimpin
- c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah (madrasah)
- d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
- e. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah (madrasah)
- f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan

---

<sup>10</sup> Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 225.

<sup>11</sup> Jerry H. Makawimbang, *Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu* (Bandung: Alfa Beta, 2012), 62.

Merujuk pada teori sifat dalam kepemimpinan, pada dasarnya teori sifat memandang bahwa keefektifan kepemimpinan itu bertolak dari sifat-sifat yang dimiliki seseorang. Keberhasilan kepemimpinan itu sebagian besar ditentukan oleh sifat-sifat tertentu, misalnya harga diri, kecerdasan, kelancaran berbahasa, dan kreatifitas. Pemimpin dikatakan efektif bila memiliki sifat-sifat kepribadian yang baik dan sebaliknya.

## 2. Kompetensi Manajerial

Kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu:

- a. Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan
- b. Mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan
- c. Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal
- d. Mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal
- e. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah
- f. Mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat serta merencanakan tindak lanjutnya.<sup>12</sup>

Bila seluruh kompetensi manajerial dikuasai dan dilaksanakan dengan baik, maka terwujudnya sekolah unggul dan mandiri akan dapat dicapai. Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Empat ketrampilan manajerial kepala sekolah:

---

<sup>12</sup> Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), 303

- a. Pertama, ketrampilan melakukan perencanaan. Kepala sekolah harus mampu melakukan proses perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun perencanaan jangka panjang.
- b. Kedua, ketrampilan melakukan melakukan pengorganisasian. Lembaga pendidikan mempunyai sumberdaya yang cukup besar, mulai sumber daya manusia yang terdiri dari guru, karyawan, dan siswa, sumberdaya keuangan, hingga fisik mulai dari gedung serta sarana dan prasarana yang dimiliki.
- c. Ketiga, adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tahapan ini mengisyaratkan kepala sekolah membangun prosedur operasional lembaga pendidikan, memberi contoh bagaimana bekerja, membangun motivasi dan kerjasama, serta selalu melakukan koordinasi dengan berbagai elemen pendidikan.
- d. Keempat, kepala sekolah harus mampu melakukan tugas-tugas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan (supervisi) ini meliputi supervise manajemen dan juga supervisi dalam bidang pengajaran. Supervisi manajemen artinya melakukan pengawasan dalam bidang pengembangan ketrampilan dan kompetensi administrasi dan kelembagaan, sementara supervisi pengajaran adalah melakukan pengawasan dan kendali terhadap tugas-tugas serta kemampuan tenaga pendidik sebagai seorang guru.

### 3. Kompetensi Kewirausahaan

Istilah kewirausahaan atau sering disebut wiraswasta berasal dari kata *wira* dan *swasta*. *Wira* berarti berani, utama atau perkasa. Sedangkan *swasta* terdiri dari kata *swa* dan *sta*, *swa* artinya sendiri dan *sta* berarti berdiri. Maka, wiraswasta adalah mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri dengan landasan keyakinan dan watak yang luhur. Sehingga kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri yang dicirikan dengan kepribadian yang kuat dan bermental wirausaha.

Jika ingin sukses dalam mengembangkan program kewirausahaan di sekolah, maka kepala sekolah, tenaga kependidikan baik guru maupun non guru dan peserta didik harus bisa secara bersama memahami dan mengembangkan sikap kewirausahaan sesuai dengan tugas masing-masing.<sup>13</sup> Kompetensi kewirausahaan terdiri dari:

- a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah
- b. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif
- c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah
- d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah.

#### **4. Kompetensi Supervisi**

Posisi kepala sekolah dalam hal ini adalah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sekolah secara produktif. Persoalannya adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan sendiri, oleh karena itu ada pendelegasian kepada guru maupun staf untuk memastikan bahwa pendelegasian tugas itu dilaksanakan secara tepat waktu dan dengan cara yang tepat. Kompetensi supervisi ini terdiri dari:

- a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
- b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat
- c. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru

#### **5. Kompetensi Sosial**

Kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi oleh pemerintah perlu mendapatkan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, kepala

---

<sup>13</sup> Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2009), 151.



sekolah harus mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan sekolah.

Kompetensi social yang harus dimiliki terdiri dari:

- a. Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah
- b. Berperan aktif dalam kegiatan akademik dan non akademik
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat
- d. Berpartisipasi dalam organisasi social kemasyarakatan
- e. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.<sup>14</sup>

#### **d. Tugas Kepala Sekolah**

Sebagai pemimpin kepala sekolah memiliki tugas-tugas yang sangat strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Tugas-tugas kepala sekolah adalah sebagai berikut:

##### **1. Membuat perencanaan**

Perencanaan ini berkaitan dengan program pengajaran, kesiswaan, membina guru, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan pengembangan aktivitas siswa yang bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Tanpa perencanaan atau *planning* pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin juga kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah harus membuat rencana tahunan.

##### **2. Pengembangan dan pemberdayaan kepegawaian**

Dalam memberi atau membagi tugas pekerjaan personil, kepala sekolah hendaknya memperhatikan kesesuaian antara beban dan jenis tugas dengan kondisi serta kemampuan pelaksanaannya.

##### **3. Pengelolaan administrasi sekolah**

Mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan, baik uang yang berasal dari pemerintah ataupun sumber lain.

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 89.

#### 4. Pengembangan sarana dan prasarana madrasah

Pengembangan sarana sekolah disini meliputi perbaikan atau rehabilitas gedung sekolah, penambahan ruang kelas, perbaikan atau pembuatan lapangan olahraga, perbaikan atau pengadaan bangku murid dan sebagainya.<sup>15</sup>

### III. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan

#### a. Hakikat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: *Pertama*, dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga fikiran dan perasaan (mental dan emosional), *Kedua*, partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok. *Ketiga*, dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikutserta dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut.<sup>17</sup>

Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan, yang berarti mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan agar kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dapat dipacu secara cepat, akhirnya kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat.

<sup>15</sup> Herabudin, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 200.

<sup>16</sup> Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Besar...*, 679.

<sup>17</sup> Suryosubroto, *Humas Dalam Dunia Pendidikan* (Yogyakarta: Mitra Gama Media, 2001), 75.

Masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masyarakat orang tua siswa, masyarakat yang terorganisasi, dan masyarakat secara luas. Masyarakat yang terorganisasi misalnya kelompok-kelompok organisasi bisnis, politik, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Masyarakat secara luas bisa berupa pribadi-pribadi, dan masyarakat secara umum.

## **b. Prinsip-prinsip Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**

Beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan menitikberatkan pada lembaga pendidikan yang mampu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Untuk itu perlu penerapan beberapa prinsip, yaitu:

### 1. Fleksibilitas

Lembaga pendidikan hendaknya mempunyai program yang cukup lentur dan beradaptasi secara terus menerus dengan perubahan-perubahan layanan lembaga lain di masyarakat. Perkembangan tuntutan masyarakat, pengetahuan, teknologi yang begitu cepat perlu diikuti dengan program pendidikan yang relevan. Misalnya perkembangan teknologi komunikasi dalam era globalisasi yang sekarang sedang terjadi.

### 2. Relevansi

Peran dan fungsi lembaga pendidikan hendaknya ditentukan sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena anak setelah menyelesaikan studi akan kembali kepada masyarakat sebagai pengguna lulusan suatu lembaga pendidikan.

### 3. Partisipasi

Lembaga pendidikan bersama masyarakat hendaknya mengembangkan program kegiatan dan layanan guna memperluas, memperbarui, memadukan pengalaman berbagai kelompok umur pada semua tingkatan. Lembaga pendidikan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat ini.

#### 4. Komprehensi

Lembaga pendidikan harus selalu menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang lebih luas, intern bangsa maupun secara internasional. Lulusan tidak hanya dipersiapkan untuk intern (lokal) tapi bias diperluas sesuai dengan kebutuhan.

#### 5. Melembaga

Layanan efektif dalam masyarakat pada setiap warga Negara hanya dapat dicapai melalui organisasi, terutama organisasi pendidikan yang dikelola secara baik. Dalam memaksimalkan partisipasi masyarakat, kegiatannya perlu diorganisasi secara baik.<sup>18</sup>

Partisipasi masyarakat dan warga sekolah dalam mewujudkan sekolah yang bermutu perlu dimaksimalkan. Makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa tanggungjawab dan akhirnya makin besar pula tingkat dedikasinya.

### c. Pengaruh Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan

Masyarakat selalu bertumbuh dan berkembang. Masyarakat memiliki dinamika. Selain itu setiap masyarakat memiliki identitas tersendiri sesuai dengan pengalaman kesejahteraan dan budayanya. Identitas dan dinamika itu secara langsung akan berpengaruh terhadap tujuan, orientasi, dan proses pendidikan di sekolah.

Identitas suatu masyarakat dan dinamikanya, senantiasa membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pendidikan pada lembaga persekolahan. Hal tersebut dikarenakan sekolah merupakan institusi yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pengaruh identitas suatu masyarakat terhadap program pendidikan di sekolah-sekolah bisa dibuktikan dengan berbedanya orientasi dan tujuan pendidikan pada masing-masing negara. Setiap negara memiliki ciri khas dalam orientasi dan tujuannya. Pengaruh pertumbuhan dan perkembangan masyarakat juga terlihat dalam perubahan orientasi dan tujuan pendidikan, dari satu periode tertentu, dengan periode berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada kurikulum yang bersifat permanen.

<sup>18</sup>

Maisyaroh,dkk., *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan* (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003), 122.

Akan tetapi selalu dinilai, disempurnakan, disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang terjadi. Soal orientasi juga dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan masyarakat.

Oleh karena orientasi dan tujuan pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, maka proses pendidikan di sekolah tidak dapat lepas dari pengaruh masyarakat. Pengaruh yang dimaksud yaitu pengaruh sosial budaya dan partisipasinya. Pengaruh sosial budaya biasanya tercermin dalam proses belajar mengajar menyangkut pola aktivitas pendidik maupun anak didik. Sedangkan pengaruh partisipasi berdampak pada proses penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan berbagai komponen baik komponen manusiawi dan manusiawi, atau komponen materiil dan non materiil, seperti dukungan moril dan dana untuk perlengkapan dan kebutuhan pendidikan.

Mengingat pentingnya hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat, maka penting pula direalisirnya dengan berbagai bentuk dan cara pelaksanaannya. Beberapa bentuk atau cara yang telah dikenal adalah; pemberian kesempatan kepada orang tua murid berkunjung ke sekolah untuk membicarakan masalah khusus yang terjadi pada anaknya; kunjungan sekolah ke rumah murid, pertemuan antara orang tua murid dan warga sekolah, dan mengefektifkan komite sekolah.<sup>19</sup>

#### **d. Jenis-jenis Partisipasi Sekolah dengan masyarakat**

Banyak orang mengartikan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat itu dalam pengertian yang sempit. Mereka berpendapat bahwa hubungan kerjasama itu hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. Padahal, hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat mengandung arti yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu bidang-bidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat pada umumnya.

Hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Hubungan Edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa, antara guru di sekolah dan orang tua didalam keluarga. Adanya

---

<sup>19</sup>

Daryanto, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 150.

hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua tidak saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika ataupun norma-norma sosial yang hendak ditanamkan pada diri anak. Juga kerjasama dalam berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar di sekolah maupun di rumah, dalam memecahkan masalah yang menyangkut kesulitan belajar maupun kenakalan anak.

2. Hubungan Kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Untuk itu diperlukan adanya hubungan kerjasama yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan dalam masyarakat. Kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode pengajarannya.
3. Hubungan Institusional, yaitu hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti: hubungan kerjasama antara sekolah satu dengan sekolah-sekolah lainnya, kepala pemerintahan setempat, ataupun perusahaan-perusahaan Negara, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya.<sup>20</sup>

Selanjutnya, partisipasi masyarakat dapat dibedakan dalam berbagai aspek dan bentuk yang umum dilakukan, yaitu:

1. Sumbangan Pemikiran

Sumbangan pemikiran dapat dilakukan dalam bentuk tertulis, lisan, atau saran-saran lainnya dalam konsultasi rutin antara pengelola sekolah dengan tokoh-tokoh dan warga masyarakat.

2. Sumbangan Tenaga

Sebagian warga masyarakat desa adalah kaum miskin. Dan tak dapat diingkari bahwa sebagian peserta didik sekolah swasta di pedesaan

---

<sup>20</sup> Ngalm Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), 194-196

datang dari keluarga miskin. Oleh karena itu adalah sangat bijak jika komite sekolah juga memungkinkan orang tua peserta didik beban sekolah anaknya dalam bentuk tenaga berupa melakukan perbaikan gedung, memelihara kebun sekolah, atau menyumbangkan tenaga sebagai narasumber atau pelatih dalam bidang ketrampilan kehidupan dan kerajinan tertentu.

3. Sumbangan Barang atau Natura

Sebagaimana dengan sumbangan tenaga, banyak wali peserta didik tidak memiliki cukup uang, namun tidak juga mempunyai keahlian atau ketrampilan yang akan disumbangkan. Sekolah dan komite sekolah dapat meminta orang tua menyumbangkan produk ladang, pertanian, perkebunan, atau ikan sebagai pengganti uang sekolah

4. Memberikan Kemudahan dan Peluang

Peran serta masyarakat dalam bentuk memberikan kemudahan dan peluang sering sangat berharga dalam perkembangan sekolah. Masyarakat atau kelompok masyarakat dapat memberikan sumbangan dalam bentuk kemudahan kepada sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan, perizinan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan warga masyarakat dan sebagainya.

5. Sumbangan Dana dari Perorangan atau Perusahaan

Sumbangan dalam bentuk uang adalah sumbangan yang sering diminta oleh sekolah khususnya kepada orang tua murid, diantaranya yakni:

- a. Sumbangan dana yang utama adalah dari orang tua peserta didik yang sangat berkepentingan dengan pelayanan sekolah
- b. Infak, shodaqoh dan zakat
- c. Donasi dari perusahaan dalam berbagai bentuk.<sup>21</sup>

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas bermacam-macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan adanya hubungan kerja sama tersebut. Dengan adanya hubungan ini sekolah dapat meminta bantuan

<sup>21</sup> Hanun Asrohah, *Model Manajemen Sekolah Efektif* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), 78.

dari lembaga-lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, narasumber, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan program sekolah.

Dengan dilaksanakannya ketiga jenis hubungan sekolah dan masyarakat seperti telah diuraikan diatas, diharapkan sekolah tidak lagi selalu ketinggalan dengan perubahan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang. Adanya hubungan sekolah dan masyarakat ini dimaksudkan pula agar proses belajar yang berlaku di sekolah mengalami perubahan, dari proses belajar dengan cara menyuapi dengan bahan pelajaran yang telah dicerna oleh guru menjadi proses belajar yang inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris.<sup>22</sup> Anak-anak dididik untuk berpartisipasi dalam arti luas di dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengantisipasi kehidupan masyarakat yang akan datang tempat mereka akan hidup dan terlibat di dalamnya setelah mereka dewasa.

#### **IV. Strategi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Menuju Generasi Maju Indonesia**

Generasi maju merupakan generasi yang mempunyai karakteristik cerdas, memiliki jatidiri, kemandirian, ketangguhan, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan masyarakat global. Generasi maju memberikan harapan dan semangat baru bagi Indonesia untuk dapat menjadi Negara maju dengan sumber daya manusia berkualitas yang siap bersaing dengan Negara-negara maju lainnya. Orangtua dan masyarakat berperan untuk membimbing, mengarahkan dan menumbuhkan kecintaan anak-anak mereka untuk “membaca” dan menyukai ilmu pengetahuan sesuai dengan minat dan bakat anak. Sekolah sebagai institusi yang menghasilkan sumber daya manusia tingkat tinggi harus mampu mengarahkan kepada peserta didik agar memiliki kepribadian matang yang berakhlak mulia dengan *multiple intelegence* dan pandangan visioner sebagai motor penggerak dalam memajukan bangsa dan Negara. Generasi maju adalah generasi yang dibutuhkan kehadirannya oleh

---

<sup>22</sup> A.R. Tilaar, *Futurisme dan Pengambilan Kebijakan Pendidikan Menyongsong Abad 21* (Jakarta: IKIP Jakarta, 1987), 16.



bangsa Indonesia yang diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya bagi Indonesia.

Peranan kepala sekolah yang aktif dalam menggalakkan program-program sekolah melalui partisipasi aktif masyarakat sangat penting bagi sekolah untuk menjalankannya. Ada beberapa strategi yang harus diupayakan kepala sekolah dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program sekolah, diantaranya:

### **1. Menjalinkan Komunikasi yang Efektif dengan Orang Tua dan Masyarakat**

Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi prinsip menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, yaitu:

- a. Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh orang kunci biasanya dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat sekitarnya. Orang-orang inilah yang harus dihubungi, diajak konsultasi, dan diminta bantuannya untuk menarik orang lain berpartisipasi dalam program sekolah. Tokoh-tokoh semacam itu dapat berasal dari orang tua siswa atau warga masyarakat yang dituakan atau *informal leaders*, pejabat, tokoh bisnis, dan profesi lainnya.
- b. Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya. Misalnya tokoh seni dapat dilibatkan dalam pembinaan kesenian di sekolah. Orang yang hobi olahraga dapat dilibatkan dalam program olahraga sekolah. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut diperankan sebagai mediator dengan masyarakat luas.

- c. Memilih waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat, pihak sekolah melibatkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Misalnya kegiatan olahraga, kesenian, dan sebagainya.

## 2. Melibatkan Masyarakat dan Orang Tua dalam Program Sekolah

Pepatah tak kenal maka tak sayang juga berlaku dalam hal ini. Oleh karena itu sekolah harus mengenalkan program dan kegiatannya kepada masyarakat. Dalam program tersebut harus tampak manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu program sekolah. Untuk maksud diatas, sekolah dapat melakukan:

- a. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya kebersihan lingkungan, membantu lalu lintas di sekitar sekolah, dan sebagainya. Program sederhana semacam ini dapat menumbuhkan simpati masyarakat.
- b. Mengadakan *open house* yang memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah. Tentu saja dalam kesempatan semacam itu sekolah perlu menonjolkan program-program yang menarik minat masyarakat.
- c. Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah, untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau Pembina suatu program sekolah. Misalnya mengundang dokter yang tinggal di sekitar sekolah atau orang tua untuk menjadi pembicara atau Pembina program kesehatan sekolah.
- e. Membuat program kerjasama sekolah dengan masyarakat, misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan.

## 3. Memberdayakan Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui komite sekolah orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Untuk meningkatkan komitmen peran serta masyarakat dalam menjunjung pendidikan,

termasuk dari dunia usaha, perlu dilakukan antara lain dengan upaya sebagai berikut:

- a. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan terutama di tingkat sekolah. Melalui otonomi, pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan layanan jasa pendidikan akan semakin mendekati kepentingan masyarakat yang dilayani.
- b. Program swadana, yaitu pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada sekolah apabila masyarakat telah menyediakan sejumlah biaya pendamping.
- c. Mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan pendidikan.<sup>23</sup> Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peranan menentukan sebagai satu kekuatan atau kewibawaan di dalam menghimpun dan menggerakkan segala sumberdaya di dalam kerjasama masyarakat yang lebih luas, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumberdaya manusia, dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan politis dari segenap jajaran aparat pendidikan.

## Penutup

Kepala sekolah professional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam rangka membentuk generasi maju yang mempunyai karakteristik cerdas, memiliki jatidiri, kemandirian, ketangguhan, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan masyarakat global. Dalam hal ini kepala sekolah harus mampu merumuskan berbagai strategi dalam membina hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat bisa mengerti, memahami, dan memaklumi dengan ide-ide serta visi yang sedang berkembang di sekolah. Adapun strategi yang dilakukan kepala sekolah untuk menggalang partisipasi masyarakat adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di sekolah, mengidentifikasi dan

---

<sup>23</sup> Maisyaroh,dkk., *Manajemen Pendidikan...*, 126-128.

melibatkan tokoh masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya, serta pemilihan waktu yang tepat dalam melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, Hanun. *Model Manajemen Sekolah Efektif*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010
- Danim, Sudarwan dan Khairil. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Daryanto. *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media, 2013
- Eccles J.S.&Harold R.D. *Parent-School Involment During The Early adolescent Years*. Teacher College Record: 1993
- Herabudin. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Maisyaroh,dkk. *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003)
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Makawimbang, Jerry H. *Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu*. Bandung: Alfa Beta, 2012
- Moeliono, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- M. Sumantri dan J. Permana. *Strategi Belajar Mengajar*. Depdikbud: PT.Proyek Pendidikan Guru SD, 1999
- Mansyur, H. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1995/1996
- Purwanto, Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987
- Subakir, Supriono. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: Anggota IKAPI, 2001

- Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo, 1986
- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013
- Suryosubroto. *Humas Dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Mitra Gama Media, 2001
- Tilaar, H.A.R. *Futurisme dan Pengambilan Kebijakan Pendidikan Menyongsong Abad 21*. Jakarta: IKIP Jakarta, 1987
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Wahyudi. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar*. Bandung: Alfabeta, 2009